



b. Berdasarkan Pangkat (Golongan/Ruang)

No	Golongan	Laki - Laki				Perempuan				Jumlah (Orang)
		A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Golongan IV	7	2	3	-	5	-	-	-	17
2	Golongan III	11	6	9	18	9	9	6	10	78
3	Golongan II	-	-	2	1	-	-	-	1	4
4	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	PPPK	55				31				86
	Jumlah	60				41				185

Tabel 2.2.2 Berdasarkan Pangkat (Golongan/Ruang)

c. Berdasarkan Esselon

No.	Esselonering	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Esselon II	1	-	1
2.	Esselon III	3	1	4
3.	Esselon IV	13	5	18
	Jumlah	17	6	23

Tabel 2.2.3 Berdasarkan Esselon

d. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki - Laki		Perempuan		Jumlah (Orang)
		ASN	P3K	ASN	P3K	
1	S3	1	-	-	-	1
2	S2	17	3	9	1	30
3	S1	37	38	26	24	125
4	D4	-	1	-	2	3
5	D3	4	1	1	3	10
6	SMA	4	12	-	1	17
	Jumlah	63	55	36	31	185

Tabel 2.2.4 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya,



sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategis pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Tahun pertama hingga tahun ke empat Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih memiliki berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategis pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan memberikan pelayanan secara tidak langsung berhubungan dengan masyarakat dan penyelenggara layanan dengan memperhatikan kesetaraan gender dan disabilitas dimana gedung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan seperti tangga dan lantai khusus difabel yaitu jalur landai dan jalur kuning tuna netra, serta pemisahan toilet pria dan wanita. Dalam kinerja pelayanannya pada tahun 2024 inovasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah mendapatkan penghargaan antara lain :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 sebesar 88,25 dalam Kategori “A”;
 2. Penghargaan Kategori Perangkat Daerah Responsif Gender pada Peringatan Hari Ibu Ke-96 Tahun 2024;
 3. Juara 1 Tingkat Nasional Lomba Tenaga Kerja Konstruksi (Kategori : Operator Excavator) yang dilaksanakan oleh Kementerian PU;
 4. Juara 2 Tingkat Nasional Lomba Tenaga Kerja Konstruksi (Kategori : Rumah Mini Jabatan Kerja Keramik) yang dilaksanakan oleh Kementerian PU;
 5. Juara 3 Tingkat Nasional Lomba Tenaga Kerja Konstruksi (Kategori : Juru Ukur) yang dilaksanakan oleh Kementerian PU
 6. Penghargaan Terbaik 3 sebagai OPD yang melaksanakan Konsolidasi Tahap Pelaksanaan 2025
-



Dalam upaya melakukan inovasi dalam Penyediaan Perumahan bagi MBR melalui upaya Kolaboratif, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melakukan kerjasama antar OPD, melalui CSR dengan BUMN dan BUMD melalui beberapa program kegiatan yaitu Program Bedah Rumah, fasilitasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh kewenangan Provinsi sebanyak 24 unit rumah dan penataan kawasan kumuh, pembangunan/peningkatan jalan lingkungan, penyediaan sarana prasarana air minum dan sanitasi.

Disamping penghargaan yang telah didapatkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki aplikasi dan web dinas, meliputi aplikasi SIPPERA, aplikasi *Housing Clinic* serta sosial media yaitu *Youtube*, *TikTok*, *Facebook* dan *Instagram*.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tupoksi dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman yang hasilnya dapat langsung dirasakan / diperlukan oleh masyarakat. Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan memiliki gedung Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) yang secara langsung memberikan layanan informasi mengenai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun perkembangan pelayanan yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, antara lain :

1. Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
-



- Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
2. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
- Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha
 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha
3. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
 - Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
4. Bidang Perumahan
- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman
 - Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman
-



Dalam pelaksanaan kinerja, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan juga menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimana mengampu 2 urusan bidang, yaitu Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Bidang Perumahan Rakyat.

Jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Urusan Bidang Pekerjaan Umum, yaitu :

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.

Adapun jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Urusan Bidang Perumahan Rakyat, yaitu :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman sudah menganggarkan kegiatan terkait Pendataan dan Penyediaan Relokasi Rumah akibat terjadinya bencana, sesuai dengan arahan Kemendagri apabila OPD telah menganggarkan terkait kegiatan pendataan bencana maupun identifikasi bencana namun tidak terjadi bencana maka capaian di anggap 100 persen dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan identifikasi/pendataan pada kawasan rawan bencana.

Terlaksananya program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari dukungan semua pihak agar berjalan dengan baik, akan tetapi dalam kenyataan pelaksanaan kegiatan pembangunan ini juga banyak memiliki tantangan, antara lain :

1. Tantangan Pelayanan Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
 - a. Permukiman kumuh tersebar pada kawasan padat yang terletak di perkotaan maupun perdesaan. Permukiman padat tersebut
-

tidak memenuhi syarat-syarat permukiman yang sehat karena tidak di lengkapi dengan 7 komponen kumuh, yaitu kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran;

- b. Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan SK Kumuh yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. SK Kumuh yang sesuai dengan batasan kewenangan Provinsi yaitu pada luasan 10-15 Ha;
 - c. Infrastruktur dan pelayanan dasar permukiman yang belum memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh;
 - d. Meningkatkan pemanfaatan penataan kawasan secara optimal dalam peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan;
 - e. Melibatkan peranan CSR dalam penyediaan rumah tidak layak huni (RTLH)
 - f. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
2. Tantangan Pelayanan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
- a. Pembangunan prasarana air minum berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk di pedesaan maupun di perkotaan yang cukup pesat sehingga menjadi tantangan dalam penyediaan akses air minum lintas kabupaten/kota. Di Provinsi Sumatera Selatan jarak antar kabupaten yang cukup jauh dan sebagian besar berupa hutan-hutan dan rawa sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar dalam pelaksanaan kegiatan air minum lintas kabupaten/kota skala regional;
 - b. Penyediaan air minum dan sanitasi pada kawasan strategis provinsi;
 - c. Meningkatkan keterpaduan penanganan sanitasi antar kabupaten/kota. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat

terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis;

- d. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan;
- e. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

3. Tantangan Pelayanan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

- a. Meningkatkan pelayanan dalam membangun bangunan gedung dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK);
 - b. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Stakeholder dalam Pembangunan;
 - c. Penyediaan Pembangunan, Renovasi, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi;
 - d. Pendampingan Legalisasi Perencanaan Teknis dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Meningkatkan Pendayagunaan Sumberdaya Perumahan dan Permukiman melalui penerapan teknologi tepat guna dalam rangka mendorong pemanfaatan bahan dan produksi bahan bangunan lokal yang murah serta konstruksi bangunan tahan gempa;
 - f. Masih kurangnya tenaga terampil dan tenaga ahli di bidang konstruksi, terutama untuk mendukung pelaksanaan keistimewaan;
 - g. Memperkuat pasar konstruksi dan meningkatkan profesionalisme industri konstruksi. Termasuk perlunya memperkuat para pelaku usaha konstruksi kecil dan menengah antara lain karena lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi;
-



- h. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
4. Tantangan Pelayanan Bidang Perumahan
- a. Ketidak mampuan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak huni dan terjangkau serta memenuhi standar lingkungan permukiman yang sehat dan aman sehingga terbatasnya jangkauan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - b. Meningkatkan penyediaan hunian layak dan terjangkau serta penyediaan lahan untuk perumahan yang dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - c. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah akibat bencana dan relokasi pemerintah yang layak huni serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
 - d. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya perumahan dan permukiman melalui penerapan teknologi tepat guna dalam rangka mendorong pemanfaatan bahan dan produksi bahan bangunan lokal yang murah serta konstruksi bangunan tahan gempa, dan menggunakan teknologi rumah instan sederhana dan sehat;
 - e. Mendorong pengembangan sarana dan prasarana permukiman untuk memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat;
 - f. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani				100	100	-	-	-	100	100	-	-		100	100	-	-	-
	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah				-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100
	Persentase Pelaksanaan Program Pengembangan Permukiman dan Bangunan yang Terpublikasi				N/A	N/A	N/A	N/A	80	N/A	N/A	N/A	N/A	80	N/A	N/A	N/A	N/A	80
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak				75,08	84,70	84,90	86,91	88,35	80,78	84,70	86,35	87,19	87,23	107,59	100,00	101,71	100,32	98,73
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota				-	-	1	1,5	1	-	-	0	1,5	1	-	-	0	100	100
	Jumlah dokumen air minum regional yang tersusun				-	-	2	3	-	-	-	2	3	-	-	-	100	100	-
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak				84,75	87,63	90,26	92,96	80,62	76,94	78,08	78,62	80,54	77,34	90,78	89,10	87,10	86,64	95,93
	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional				-	-	1	1,5	1	-	-	0	1,5	1	-	-	0	100	100
	Persentase Kabupaten/Kota yang Mengoperasionalkan IPLT				-	-	-	-	58,82	-	-	-	-				-	-	-
	Jumlah dokumen sanitasi regional yang tersusun				-	-	2	3	-	-	-	2	3	-	-	-	100	100	-
	Persentase dokumen sanitasi regional yang tersusun				N/A	N/A	N/A	N/A	33,33	N/A	N/A	N/A	N/A	33,33	N/A	N/A	N/A	N/A	100
	Rasio pelayanan pengelolaan drainase				-	-	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-	100	100	-
	Persentase Drainase Kewenangan Provinsi yang Dibangun				N/A	N/A	N/A	N/A	33,33	N/A	N/A	N/A	N/A	33,33	N/A	N/A	N/A	N/A	100



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah dokumen pendukung pembangunan infrastruktur drainase regional dan daerah strategis provinsi yang tersusun				-	-	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-	100	100	-
	Persentase dokumen pendukung pembangunan infrastruktur drainase regional dan daerah strategis provinsi yang tersusun				N/A	N/A	16,67	16,67	16,67	N/A	N/A	0	16,67	16,67	N/A	N/A	0	100	100
	Rasio pelayanan pengelolaan persampahan regional				-	-	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-	100	100	-
	Jumlah dokumen pendukung pembangunan infrastruktur persampahan regional yang tersusun				-	-	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-	100	100	-
	Persentase dokumen pendukung pembangunan infrastruktur persampahan regional yang tersusun				N/A	N/A	20	20	20	N/A	N/A	20	20	20	N/A	N/A	100	100	100
4	Jumlah SDM Jasa Konstruksi				600	750	-	-	-	298	162	-	-	-	49,67	21,60	-	-	-
	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli				-	-	0,44	0,45	0,46	-	-	1,09	0,76	1,54	-	-	247,73	168,89	334,78
5	Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani				-	-	25	30	31	-	-	25	30	30	-	-	100	100	96,77
6	Persentase Bangunan Gedung dan Lingkungan Ruang Publik yang telah Memenuhi NSPK				58,41	64,25	-	-	-	66,89	70.506	-	-	-	114,52	109,74	-	-	-
7	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan yang tertangani				-	-	25	30	31	-	-	25	30	30	-	-	100	100	96,77
8	Jumlah Lingkungan Ruang Publik yang Dilengkapi Sarana dan Prasarana Utilitas yang Baik				6	7	-	-	-	6	14	-	-	-	100	200	-	-	-
9	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)				5,83	5,17	-	-	-	5,45	2,85	-	-	-	93,48	100	-	-	-



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10	Luas Kawasan Kumuh dengan Sarana dan Prasarana yang Baik				1247,78	27,1	-	-	-	1074,78	1121,28	-	-	-	86,14	4137,56	-	-	-
	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani				-	-	8,5	11	11,21	-	-	8,99	11,18	11,40	-	-	105,76	101,64	101,69
11	Persentase Kepala Keluarga yang Memiliki Rumah				90,15	91,58	-	-	-	91,48	81,42	-	-	-	101,48	88,91	-	-	-
	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni				-	-	50	80	82	-	-	100	100	100	-	-	200	125	121,95
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni				-	-	50	80	82	-	-	100	100	100	-	-	200	125	121,95
12	Jumlah Kawasan Permukiman yang Tertata Prasarana Utilitas				14	17	-	-	-	21	22	-	-	-	150	129,41	-	-	
13	Jumlah Lingkungan Ruang Publik yang Dilengkapi Sarana dan Prasarana Utilitas yang Baik				6	7	-	-	-	6	14	-	-	-	100	200	-	-	
	Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU				-	-	29	31	34,02	-	-	31,95	35,68	49,37	-	-	110,17	115,10	145,12
14	Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Bagi Keluarga Miskin yang Tertata				396,7	423,14	-	-	-	396,7	396,7	-	-	-	100	93,75	-	-	
15	Persentase Rumah Tangga Miskin dengan Akses Air Minum Layak				2,43	4,22	-	-	-	1,08	1,08	-	-	-	44,44	25,59	-	-	
16	Persentase Rumah Tangga Miskin dengan Akses Sanitasi Layak				18,77	19,71	-	-	-	17,85	17,85	-	-	-	95,10	90,56	-	-	
17	Persentase Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah di Wilayah Provinsi yang Tersertifikasi				-	-	1	2	1	-	-	1	2	1	-	-	100	100	100